

DATA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH (KSDD/KSDPK)
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025

PEMRAKARSAN DAN MITRA KERJA SAMA		JUDUL DOKUMEN PERJANJIAN	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	RUANG LINGKUP URUSAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JENIS KERJA SAMA	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6		7	8
1.	1. BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor : 100.3.7.1/66/MU/2025 Nomor : 3.Pj/KS.01/BPH/2025	11 Februari 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> 1. Pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBJP untuk konsumen pengguna 2. Peningkatan koordinasi terkait penyaluran JBT dan JBJP di Maluku Utara 3. Pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBJP 4. Peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala daerah/kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa di Provinsi Maluku Utara 5. Pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah terhadap JBT dan JBJP.	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	5 Tahun	Sudah di tanda tangani KEDUA PIHAK dan Dokumen file dalam format PDF sudah dikirim ke Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah PKS lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU BPH MIGAS dan PIHAK KEDUA Dinas ESDM Prov.Malut.
2.	1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Nomor : 100.3.7.1/102/PKS/011.0/2025 Nomor : 100.3.7.1/1299/MU/2025	12 Maret 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> 1. Pengelolaan informasi dan komunikasi 2. Pengembangan sistim pemerintahan berbasis elektronik 3. Peningkatan penyelenggaraan statistik 4. Pengelolaan keamanan informasi	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	1 Tahun	Sudah ditandatangani KEDUA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF dan dokumen asli fisik Naskah PKS lengkap dan sementara berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA
3.	1. PEMERINTAN PROVINSI MALUKU UTARA 2. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	PENGUATAN PROGRAM STRATEGIS TATA KELOLA ASET TANAH PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MELALUI LEGALISASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH DI PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor: 100.3.7.1/1975/MU/2025 Nomor : 01/SKB.UP.01.01/IV/2025	25 April 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Pelaksanaan survey dan pengukuran dan pemetaan aset tanah b. Alih media sertifikat dan pembuatan brankas elektronik c. Percepatan pelaksanaan legalisasi aset tanah d. Penyelesaian permasalahan e. Integrasi data f. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana g. Peningkatan kompetensi SDM h. Pembentukan tim teknis	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DI DAERAH	5 Tahun	Sudah ditandatangani KEDUA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah PKS lengkap dan sementara berada di tim Ajudan Gubernur Malut dan Kanwil BPN Malut.

4.	1. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) TERNATE 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor : MoU/5/052025 Nomor : 100.3.7.1/5378/mu/2024	5 Mei 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Penyusunan regulasi dan peningkatan serta perluasan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan [ekerjaan bagi pemberi kerja penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberikerja, pekerja dalam penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. b. Perluasan kepesertaan/anggota jaminan sosial ketenagakerja, persyaratan kepeserta/anggota BPJS ketenagkerjaan dalam pelayanan publik tertentu. c. Peningkatan kesadaran dan kepedulian mesyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan/keanggotaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama perangkat daerah terkait.	NOTA KESEPAKATAN	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	5 Tahun	Sudah ditandatangani KEDUA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah NK lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU BPJS Ketenagakerjaan Ternate dan PIHAK KEDUA Dinas Tenagkerja Prov.Malut.
5.	1. PEMERINTAN PROVINSI MALUKU UTARA 2. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA	PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Nomor : 100.3.7.1/2134/MU/2025 Nomor :B.18/Q.2/Gs.1/05/2025	6 Mei 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Pemberian bantuan hukum yaitu pemberian jasa hukum bidang perdata dan tata usaha negara didalam maupun diluar pengadilan oleh PIHAK KEDUA selaku jaksa pengacara negara untuk mewakili PIHAK KESATU. b. Pemberian pertimbangan hukum yaitu pemebrian jasa hukum oleh PIHAK KEDUA sebagai jaksa pengacara negara kepada PIHAK KESATU dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion/LO) dan atau pendampingan hukum (legal asistance/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara) c. Tindakan hukum lain yaitu pemberian jasa hukum oleh jaksa pengacara negara selain bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka penyelamatan dan pemulihan (kekayaan, keuangan dan aset negara) PIHAK KESATU serta menegakan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan terkait hukum perdata dan tata usaha negara PIHAK KESATU.	KESEPAKATAN BERSAMA	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DI DAERAH	2 Tahun	Sudah ditanda tangani KEDUA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF sudah dikirim ke Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara Naskah fisik asli KSB berada di PIHAK KESATU (Tim ajudan Gubernur) dan PIHAK KEDUA Kejaksaan Tinggi Malut.

6	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE	BEASISWA MALUKU UTARA BANGKIT	Nomor : 100.3.7.1/2375/MU/2025 Nomor : 337/In.16/HM.01/05/2025	16 Mei 2025	TUJUAN a. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu di Istitut Agama Islam Negeri Ternate b. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi Masyarakat Maluku Utara yang memiliki keterbatasan ekonomi. c. Menjalin sinergi PARA PIHAK dalam pengembangan SDM RUANG LINGKUP 1.PIHAK KESATU a. Memberikan anggaran beasiswa mulai tahun 2025 b. Menetapkan petunjuk teknis beasiswa Maluku Utara Bangkit melalui Pergub Maluku Utara dengan tata caranya..syarat khusus, penetapan kuota, besaran dana beasiswa, serta tata cara verifikasi dan falidasi serta mekanisme penyaluran beasiswa 2. PIHAK KEDUA a. Melakukan sosialisasi pemberian beasiswa secara aktif kepada mahasiswa b. Melakukan verifikasi secara seksama terhadap dokumen pendukungyang diajukan oleh calon penerima beasiswa sesuai juknis. c. memberikan rekomendasi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU d. Memantau penggunaan beasiswa dan perkembangan akademik penerima beasiswa e. Melaporkan hasil evaluasi pemberian beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU.	NOTA KESEPAHAMAN	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	Tidak dicantumkan (Berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan yang tertulis di Pasal 5 Jangka Waktu dengan ketentuan ketentuan yang ada di ayat 2 huruf a dan b dalam Nota Kesepahaman tersebut).	Sudah ditandatangani KEDUA PIHAK, dokumen file dalam bentuk PDF sudah berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara Naskah asli NK berada di PIHAK KESATU Dinas Pendidikan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA IAIN Ternate.
---	---	----------------------------------	---	-------------	--	------------------	--	--	---

7.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. UNIVERSITAS HALMAHERA	BEASISWA MALUKU UTARA BANGKIT	Nomor:100.3.7.1/2377/MU/2025 Nomor:177/Uniera/DN/2025	16 Mei 2025	TUJUAN a. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu di Universitas Halmahera b. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi Masyarakat Maluku Utara yang memiliki keterbatasan ekonomi. c. Menjalin sinergi PARA PIHAK dalam pengembangan SDM RUANG LINGKUP 1.PIHAK KESATU a. Memberikan anggaran beasiswa mulai tahun 2025 b. Menetapkan petunjuk teknis beasiswa Maluku Utara Bangkit melalui Pergub Maluku Utara dengan tata caranya..syarat khusus, penetapan kuota, besaran dana beasiswa, serta tata cara verifikasi dan falidasi serta mekanisme penyaluran beasiswa 2. PIHAK KEDUA a. Melakukan sosialisasi pemberian beasiswa secara aktif kepada mahasiswa b. Melakukan verifikasi secara seksama terhadap dokumen pendukungyang diajukan oleh calon penerima beasiswa sesuai juknis. c. memberikan rekomendasi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU d. Memantau penggunaan beasiswa dan perkembangan akademik penerima beasiswa e. Melaporkan hasil evaluasi pemberian beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU.	NOTA KESEPAHAMAN	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	Tidak dicantumkan (Berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan yang tertulis di Pasal 5 Jangka Waktu dengan ketentuan ketentuan yang ada di ayat 2 huruf a dan b dalam Nota Kesepahaman tersebut).	Sudah ditandatangani KEDUA PIHAK, dokumen file dalam bentuk PDF sudah berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara Naskah asli NK berada di PIHAK KESATU Dinas Pendidikan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA Universitas Halmahera.
----	---	----------------------------------	--	-------------	---	------------------	--	--	--

8.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA	BEASISWA MALUKU UTARA BANGKIT	Nomor:100.3.7.1/2376/MU/2025 Nomor:08/R.UMMU/MoU/V/2025	16 Mei 2025	TUJUAN a. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA b. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi Masyarakat Maluku Utara yang memiliki keterbatasan ekonomi. c. Menjalin sinergi PARA PIHAK dalam pengembangan SDM RUANG LINGKUP 1.PIHAK KESATU a. Memberikan anggaran beasiswa mulai tahun 2025 b. Menetapkan petunjuk teknis beasiswa Maluku Utara Bangkit melalui Pergub Maluku Utara dengan tata caranya..syarat khusus, penetapan kuota, besaran dana beasiswa, serta tata cara verifikasi dan falidasi serta mekanisme penyaluran beasiswa 2. PIHAK KEDUA a. Melakukan sosialisasi pemberian beasiswa secara aktif kepada mahasiswa b. Melakukan verifikasi secara seksama terhadap dokumen pendukungyang diajukan oleh calon penerima beasiswa sesuai juknis. c. memberikan rekomendasi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU d. Memantau penggunaan beasiswa dan perkembangan akademik penerima beasiswa e. Melaporkan hasil evaluasi pemberian beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU.	NOTA KESEPAHAMAN	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	Tidak dicantumkan (Berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan yang tertulis di Pasal 5 Jangka Waktu dengan ketentuan ketentuan yang ada di ayat 2 huruf a dan b dalam Nota Kesepahaman tersebut).	Sudah ditandatangani KEDUA PIHAK, dokumen file dalam bentuk PDF sudah berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara Naskah asli NK berada di PIHAK KESATU Dinas Pendidikan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA.
----	---	----------------------------------	--	-------------	---	------------------	--	--	--

9.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. UNIVERSITAS KHAIRUN	BEASISWA MALUKU UTARA BANGKIT	Nomor:100.3.7.1/2374/MU/2025 Nomor:1441/UN44/KS.01/2025	16 Mei 2025	<u>TUJUAN</u> a. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu di UNIVERSITAS KHAIRUN b. Meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi Masyarakat Maluku Utara yang memiliki keterbatasan ekonomi. c. Menjalin sinergi PARA PIHAK dalam pengembangan SDM <u>RUANG LINGKUP</u> 1.PIHAK KESATU a. Memberikan anggaran beasiswa mulai tahun 2025 b. Menetapkan petunjuk teknis beasiswa Maluku Utara Bangkit melalui Pergub Maluku Utara dengan tata caranya..syarat khusus, penetapan kuota, besaran dana beasiswa, serta tata cara verifikasi dan falidasi serta mekanisme penyaluran beasiswa 2. PIHAK KEDUA a. Melakukan sosialisasi pemberian beasiswa secara aktif kepada mahasiswa b. Melakukan verifikasi secara seksama terhadap dokumen pendukungyang diajukan oleh calon penerima beasiswa sesuai iuknis. c. memberikan rekomendasi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU d. Memantau penggunaan beasiswa dan perkembangan akademik penerima beasiswa e. Melaporkan hasil evaluasi pemberian beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU.	NOTA KESEPAHAMAN	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	Tidak dicantukam (Berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan yang tertulis di Pasal 5 Jangka Waktu dengan ketentuan ketentuan yang ada di ayat 2 huruf a dan b dalam Nota Kesepahaman tersebut).	Sudah ditandatangani KEDUA PIHAK, dokumen file dalam bentuk PDF sudah berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara Naskah asli NK berada di PIHAK KESATU Dinas Pendidikan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA UNIVERSITAS KHAIRUN.
10.	1. BALAI SENTRA WASANA BAHAGIA DI TERNATE 2. DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA 3. DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA	PELAYANAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL DI PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor :1099/4.21/RH.00.01/05/2025 Nomor :400.9.7/296.01/2025 Nomor :400.9.7/82DINSOS.MU// 2025	19 Mei 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga dan kelompok b. Perolehan akses, data dan informasi c. Pemberian layanan kesehatan kepada individu, keluarga dan kelompok.	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH YANG ADA DI DAERAH	2 Tahun Dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah PKS lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Balai Sentra Wasana Bahagian ternate, PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan Prov. Malut dan PIHAK KETIGA Dinas Sosial Prov. Malut.

11.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH X	OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	Nomor : 100.3.7.1/2500/MU/2025 Nomor : 75/KTR/X.05/2025	23 Mei 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> 1. Penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional untuk seluruh penduduk 2. Optimalisasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional 3. Sosialisasi bersama terkait program jaminan kesehatan nasional 4. Bentuk kerjasama lainnya yang disepakati PARA PIHAK	NOTA KESEPAKATAN	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	5 Tahun	Sudah ditandatangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah NK lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Dinas Kesehatan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah X
12.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH X	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJAPROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALT COVERAGE	Nomor : Nomor : /KTR/X.05/2025	23 Mei 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta b. Pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP Pemda c. Jaminan pelayanan kesehatan	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	7 Bulan	Sudah ditandatangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF/Wold berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA (belum ada nomor kedua PIHAK), sementara dokumen asli fisik Naskah PKS lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Dinas Kesehatan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah X
13.	1. DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA 2. KOMANDO DAERAH MILITER XV/ PATTIMURA	PENGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARASEBAGAI DAERAH LATIHAN TEMPUR TNI	Nomor :522/706/2025 Nomor :Kerma/03/V/2025	24 Mei 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> 1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan sebagai daerah latihan tempur TNI dan sarana penunjang selain mess, perkantoran, gudang dan akses jalan. 2. Pertukaran data dan informasi berkaitan dengan kawasan hutan di Kabupaten Pulau Morotai Prov.Maluku Utara termasuk kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai daerah latihan tempur TNI, kecuali data dan informasi yang bersifat rahasia menurut peraturan perundangan yang berlaku. 3. Perlindungan dan pengamanan hutan 4. Pemulihan ekosistim melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi. 5. Penguatan kelembagaan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PARA PIHAK.	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DI DAERAH	5 Tahun	Sudah ditandatangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah PKS lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Dinas Kehutanan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA Komando Daerah Militer XV/PATTIMURA.
14.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA	PENDAMPINGAN, BANTUAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor : 100.3.7.1/2524/MU/2025 Nomor : B/18/V/HUK.8.1.1/2025	26 Mei 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Pertukaran data dan informasi b. Pendampingan, bantuan pengamanan dan pengawasan c. Penegakan hukum d. Dukungan sarana dan prasarana e. Sosialisasi	NOTA KESEPAHAMAN	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DI DAERAH	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, Sementara Naskah asli fisik NK lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU Dinas PU Prov.Malut dan PIHAK KEDUA POLDA malut.

15.	1. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Nomor : 120.23/KDH.178/KB.01/2025 Nomor : 100.3.7.1/2755/MU/2025	15 Juni 2025	A. Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. perumahan rakyat dan pemukiman 5. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 6. Sosial B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar : 1. tenaga kerja 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Pangan dan pertanian 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Adm. Dukcapil 7. Pemberdayaan masyarakat desa 8. Pengendalian penduduk dan KB 9. Perhubungan 10. Komunikasi dan informatika 11. Koperasi dan UMKM 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan olah raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan dan kearsipan C. Urusan pemerintahan pilihan meliputi : 1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan sumber daya mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi D. Urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah : 1. Perencanaan 2. Keuangan 3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian dan pengembangan 5. Dan lain lainnya sesuai perundangan	KESEPAKATAN BERSAMA (KSB)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, Sementara Naskah asli fisik KSB lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU Prov. Kepri dan PIHAK KEDUA Prov. Malut.
-----	--	---	---	--------------	---	------------------------------	--	---------	---

16.	1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Nomor : 100.3.7.1/143/2025 Nomor : 100.3.7.1/2754/MU/2025	15 Juni 2025	A. Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. perumahan rakyat dan pemukiman 5. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 6 Sosial B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar : 1. tenaga kerja 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Pangan dan pertanian 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Adm. Dukcapil 7. Pemberdayaan masyarakat desa 8. Pengendalian penduduk dan KB 9. Perhubungan 10. Komunikasi dan informatika 11. Koperasi dan UMKM 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan olah raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan dan kearsipan C. Urusan pemerintahan pilihan : 1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan sumber daya mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi D. Urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah : 1. Perencanaan 2. Keuangan 3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 4. Penelitian dan pengembangan 5. Dan lain lainnya sesuai perundangan	KESEPAKATAN BERSAMA (KSB)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, Sementara Naskah asli fisik KSB lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU Prov. Jateng dan PIHAK KEDUA Prov. Malut.
-----	---	---	--	--------------	---	------------------------------	--	---------	--

17.	1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERSI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH	Nomor : 100.3.7.1/3603/2025 Nomor : No.500.3/128/DKUKM/2025	15 Juni 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Pertukaran informasi data dan sinergi dalam pembinaan dan pendampingan kopersai dan UMKM, kewirausahaan dan digitalisasi. b. Peningkatan kapasitas SDM perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan, melalui pelatihan, magang, seminar, lokakarya, pemanfaatan teknologi, dan inofasi serta program pendampingan lainnya baik luring maupun daring. c. Fasilitasi promosi dan jaringan pemasaran produk/jasa koperasi dan UMKM antar provinsi melalui pameran bersama, kontak bisnis dan promosi daring/luring. d. Pengembangan dan perluasan jaringan kemitraan serta rantai pasok sektor koperasi, UMKM antara Jawa Tengah dan Maluku Utara dalam rangka meningkatkan skala usaha berdasarkan potensi daerah. e. Penyediaan ruang promosi dan pemasaran bersama dilokasi yang strategis. f. Melaksanakan kegiatan kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, Sementara Naskah asli fisik KSB lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU Dinas Koperasi UMKM Prov. Jateng dan PIHAK KEDUA Dinas Koperasi UMKM Prov. Malut.
18.	1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	FASILITASI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA	Nomor : 500.9.1/190/Dispar Nomor : No.500.13.6/2367/2025	15 Juni 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Pengembangan destinasi pariwisata b. Pengembangan pemasaran pariwisata c. Pengembangan SDM Pariwisata d. Pengembangan ekonomi kreatif	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, Sementara Naskah asli fisik KSB lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU Dinas Pariwisata Prov. Jateng dan PIHAK KEDUA Dinas Pariwisata
19.	1. RSUD Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE 2. DENPOM XVI/I/TERNATE	PENINGKATAN KETERTIBAN DILINGKUNGAN RSUD Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE	Nomor : 100.3.7.1/1130.RSchB/2025 Nomor : B/58/VI/2025	17 Juni 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> 1. Pengamanan terhadap fasilitas dan aset dilingkungan rumah sakit 2. Pengawasan dan pengamanan kejadian gangguan keamanan (keributan, pencurian, ancaman dll) 3. Koordinasi dalam tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran hukum ketertiban di rumah sakit. 4. Bantuan pengamanan dalam keadaan darurat (force majeure) 5. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas keamanan rumah sakit 6. Pelaporan dan dokumentasi insiden keamanan	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DI DAERAH	1 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, Sementara Naskah asli fisik PKS lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU RSUD Dr.H. CHASAN BOESOERIE TERNATE dan PIHAK KEDUA DENPOM XVI/I/ TERNATE

20.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. KOMANDO RESORT MILITER 152 BABULLAH	KERJA SAMA PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor ; Nomor ;	/...../2025	1. Pendataan dan ferifikasi calon penerima bantuan RTLH 2. Penyediaan dana pembangunan RTLH oleh Pemerinta Maluku Utara 3. Pelaksanaan pembangunan RTLH oleh personil TNI AD dibawah koordinasi Komando Resort Militer 152 BABULLAH 4. Biaya pembangunan adalah sebesar 10 % dari bantuan yang diterima oleh penerima bantuan 5. Pengawasan dan evaluasi bersama terhadap hasil pembangunan	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DI DAERAH	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen fisik masih berada di PIHAK KESATU Dinas Perkim Malut dan PIHAK KEDUA KOREM 152 BABULLAH
21.	1. RSUD Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE 2. PT KIMIA FARMA APOTEK	APOTEK PELENGKAP RUMAH SAKIT	Nomor : 100.3.7.1/1161/RSUDChB Nomor : 10/KFA.PRJVI/2025	17 Juni 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> 1. PIHAK KEDUA akan mengelola apotek pelengkap dan melayani kebutuhan obat obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang tidak tersedia di PIHAK KESATU baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap, pasien umum, pasien BPJS Kesehatan, pasien BPJS kesehatan penyakit kronis non kemoterapi paket 23 dari luar INA CBGs, pasien jaminan kesehatan daerah (jamkesda) maupun pasien institusi pihak ketiga yang bekerjasama dengan PIHAK KESATU. 2. Penggunaan sebagian ruangan di RSUD Dr. Hasan Boesoerie oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 ayat 2 yang lokasinya ditetapkan PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK PERTAMA dapat memberikan ijin penggunaan ruangan rumah sakit kepada PIHAK KEDUA ditempat lain selain tercantum pada Pasal 5 jika dianggap perlu guna meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada pasien, selain kerjasama masih berlangsung.	(ADDENDUM) PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, Sementara Naskah asli fisik addendum PKS lengkap dan sementara berada di PIHAK KESATU RSUD Dr.H. CHASAN BOESOERIE TERNATE dan PIHAK KEDUA PT. KIMIA FARMA APOTEK

22.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. PT. TELKOM SATELIT INDONESIA (TELKOMSAT)	PENGUATAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN DIGITALISASI DI PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor : Nomor :	24 Juli 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Pemanfaatan yang saling menguntungkan atas infrastruktur satelit dan teknologi komunikasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung konektivitas digital di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara; b. Pemanfaatan yang saling menguntungkan atas potensi geografis, demografis, dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah strategis pengembangan layanan satelit; c. Potensi pengembangan digitalisasi pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik; d. Potensi digitalisasi sektor pendidikan dengan penyediaan akses internet berkecepatan tinggi untuk sekolah-sekolah, khususnya SMA dan institusi pendidikan di daerah terpencil; e. Eksplorasi digitalisasi layanan kesehatan primer melalui konektivitas satelit untuk puskesmas dan fasilitas kesehatan dalam mendukung telemedicine dan sistem informasi kesehatan terintegrasi; f. Pengembangan konektivitas digital untuk desa nelayan guna mendukung peningkatan produktivitas perikanan, akses informasi pasar, dan penguatan ekonomi maritime; g. Pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung sektor maritim dan kelautan, termasuk navigasi, pemantauan sumber daya laut, dan pengawasan wilayah perairan Maluku Utara, dan h. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan transfer teknologi satelit untuk aparaturn pemerintah dan masyarakat.	NOTA KESEPAHAMAN (NK)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	3 Tahun (data tahun sementara di update)	Sudah ditandatangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF/File world (belum ada nomor dan ttd) berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah NK lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Dinas Kominfo Prov.Malut dan PIHAK KEDUA PT. Telkomsat
23.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. BIM BY ITBM	KERJA SAMA TRI DARMA PERGURUAN TINGGI	Nomor : Nomor : 026BIM/MOUVII/2025	25 Juli 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> (1) PARA PIHAK melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (2) PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan penelitian yang bermanfaat sebagai data pendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (3) PARA PIHAK bekerjasama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara.	KESEPAKATAN BERSAMA (KSB)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	5 Tahun	Sudah ditandatangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF/File world berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah KSB lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Dinas Pendidikan Prov.Malut dan PIHAK KEDUA BIM BY ITBM

24.	1. UNIVERSITAS INDONESIA 2. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor : Nomor :	30 Juli 2025	RUANG LINGKUP a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat b. Pengembangan program akademik c. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya d. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya e. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia f. Kegiatan lain yang disepakati bersama Para pihak sepakat bertemu dan berdiskusi untuk membahas, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini.	KESEPAKATAN BERSAMA (KSB)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	5 Tahun	Sudah ditandatangani PARA PIHAK, sementara dokumen asli fisik Naskah KSB lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Universitas Indonesia dan PIHAK KEDUA Dinas Pendidikan Prov.Malut
25.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	Nomor : 100.3.7.1/3700/MU/2025 Nomor : HK.02/MoU.01/D4/02/2025	30 Juli 2025	RUANG LINGKUP a. pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan intern dilingkungan PIHAK KESATU; b. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan PIHAK KESATU; c. peningkatan tatakelola keuangan dan pembangunan daerah termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan; d. pengembangan dan penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi termasuk penerapan manajemen resiko; e. bimbingan tekhnis program anti korupsi (Froud ontrol Plan); f. konsultasi penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah dan Korporasi, antara lain: 1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 3.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 4.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah; 5.Laporan Keuangan BUMD dan BLUD; dan 6.laporan Kinerja BUMD dan BLUD; g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan ketersediaan SDM PARA PIHAK.	NOTA KESEPAHAMAN (NK)	SINERGI PROGRAM ANTARA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DI DAERAH	5 Tahun	Sudah ditandatangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF/File world berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA, sementara dokumen asli fisik Naskah NK lengkap dan sementara berada PIHAK KESATU Inspektorat Malut dan PIHAK KEDUA.

26.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. PEMERINTAH PROVINSI BALI	KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH	Nomor : 100.3.7.1/3767/MU/2025 Nomor : B.36.100.3.7/38178/KS/B.PEMKESR A	4 Agustus 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Urusan Pemerintahan Wajib b. Urusan Pemerintahan Pilihan c. Urusan pendukung Urusan Pemerintahan d. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan; dan e. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan	KESEPAKATAN BERSAMA (KSB)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF dan naskah fisik KSB berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA.
27.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. PEMERINTAH PROVINSI BALI	KERJA SAMA TATA KELOLA PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKUMEN MONITORING, CONTROLLING, SURVEILLANCE FOR PREVENTION (MCSP)	Nomor : 100.2.3/163/ITPROV Nomor : B.36.100.3.7/38203/KS/B.PEMKESR A	4 Agustus 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> 1. Perencanaan dan penganggaran APBD 2. Pelayanan terpadu satu pintu 3. Peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) 4. Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) 5. Optimalisasi pendapatan daerah 6. Manajemen asset daerah 7. Tata kelola dana desa; dan 8. Pengadaan barang dan jasa	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF dan naskah fisik KSB berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA.
28.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. PEMERINTAH PROVINSI BALI	KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PARIWISATA	Nomor : 500.9.1/210/DISPRA Nomor : B.36.100.3.7/38320/KS/B.PEMKESR A	4 Agustus 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Strategi dan program pengembangan kepariwisataan b. Promosi destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif c. Peningkatan kapasitas SDM dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif.	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF dan naskah fisik KSB berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA.
29.	1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA 2. PEMERINTAH PROVINSI BALI	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DIGITAL	Nomor : 800/211.1/SPK/DKIP.MU/VII/2025 Nomor : B.36.100.3.7/38216/KS/B.PEMKESR A	4 Agustus 2025	<u>RUANG LINGKUP</u> a. Strategi dan tata kelola penerapan pemerintah digital b. Pembangunan, pengembangan, interoperabilitas dan pemeliharaan layanan SPBE dalam mendukung pemerintah digital c. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi digital SDM dalam mendukung pemerintah digital; dan	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH (KSDD)	5 Tahun	Sudah ditanda tangani PARA PIHAK, Dokumen file dalam format PDF dan naskah fisik KSB berada di Biro Pemerintahan Dan OTDA.

